

**Evaluasi Program Karepe Dimesemi Bojo bagi Penyandang Disabilitas
Mental di Dinas Sosial Kabupaten Jombang**

Aisyah Vira Ratnaningsih, Ertien Rining Nawangsari

UPN “Veteran” Jawa Timur

aisyahvira9@gmail.com

ABSTRACT

The Karepe Dimesemi Bojo (Independent Prosperous Mental Disability Rehabilitation Area of Jombang Regency) program is one of the innovations of the Jombang Regency Social Service which successfully became a finalist of the 2019 KOVABLIK. The Karepe Dimesemi Bojo program refers to poverty alleviation with the aim of increasing the role of people with mental disabilities in all areas of Jombang Regency in productive activities. This article aims to analyze the Evaluation of the Karepe Dimesemi Bojo Program for Persons with Mental Disabilities at the Jombang Regency Social Service. The theory used is the evaluation theory from William N Dunn (2003), which consists of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. Data analysis uses analysis techniques from Miles, Huberman and Salda (2014). The informants in the study included key informants, including the Head of the Social Rehabilitation Division and Mental Nurses, while secondary informants from the families of patients with mental disabilities who participated in the Karepe Dimesemi Bojo program. The results showed that the effectiveness and equity factors are not optimal because there are no independent shelters for people with mental disabilities. The adequacy factor is insufficient because the grant is still found to be a failure so that it needs to be re-evaluated. However, the efficiency, responsiveness, and accuracy factors show good results.

Keywords: Evaluation; Karepe Dimesemi Bojo program

ABSTRAK

Program Karepe Dimesemi Bojo (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) merupakan salah satu inovasi Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang berhasil menjadi finalis dari KOVABLIK tahun 2019. Program Karepe Dimesemi Bojo merujuk pada pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk meningkatkan peran masyarakat disabilitas mental di seluruh wilayah Kabupaten Jombang dalam aktivitas produktif. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Karepe Dimesemi Bojo Bagi Penyandang Disabilitas Mental Di Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Karepe Dimesemi Bojo Bagi Penyandang Disabilitas Mental Di Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi dari William N Dunn (2003), yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Analisis data menggunakan teknik analisis Miles, Huberman dan Salda (2014). Adapun informan pada penelitian meliputi informan kunci yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perawat Jiwa, sedangkan informan tambahan dari keluarga pasien penyandang disabilitas mental yang mengikuti program Karepe Dimesemi Bojo. Hasil penelitian menunjukkan pada faktor efektivitas dan perataan belum optimal hal ini karena belum terdapat shelter mandiri bagi penyandang disabilitas mental. Pada faktor kecukupan dikatakan belum cukup karena bantuan yang diberikan masih

ditemukan kegagalan sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali. Namun, pada faktor efisiensi, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan hasil yang baik.

Kata kunci: Evaluasi; Program *Karepe Dimesemi Bojo*

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diartikan sebagai gangguan atau hambatan yang dialami seseorang dari segi akal, fisik, mental, serta sensorik. Sedangkan menurut dari *World Health Organization* (WHO) disabilitas diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam beraktivitas secara normal akibat ketidakmampuan secara psikologis, fisiologis dan kelainan anatomis pada seseorang. Di Indonesia penyandang disabilitas merupakan warga negara yang memiliki hak untuk menjalankan kehidupannya, hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Pasal 6 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menegaskan setiap penyandang cacat/disabilitas memperoleh hak berupa:

- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bab III Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa prioritas penyelenggaraan kesejahteraan sosial difokuskan kepada yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki masalah sosial: (a) kemiskinan, (b) ketelantaran, (c) kecacatan, (d) keterpencilan, (e) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, (f) korban bencana, (g) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Berdasarkan undang-undang tersebut diketahui bahwa pemerintah telah berupaya mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh warga negara khususnya penyandang disabilitas di Indonesia.

Disabilitas dibedakan menjadi beberapa kategori, menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kartu Penyandang Disabilitas Bab III Pasal 12 Ayat (3) kategori disabilitas yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Disabilitas mental merupakan bentuk gangguan atau hambatan yang dialami individu pada emosi, pikir, serta perilaku. Pada disabilitas mental ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu psikososial contohnya depresi, bipolar, skizofrenia. Sedangkan gangguan kemampuan interaksi individu pada lingkungan sosial, contohnya autisme dan hiperaktif.

Wilayah di Jawa Timur yaitu Kabupaten Jombang, terdapat total 3.347 orang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mental, dengan rincian 862 orang penyandang disabilitas fisik dan mental, 1846 orang penyandang disabilitas reterdasi, dan 639 orang merupakan ODGJ. Cukup banyaknya penyandang disabilitas mental membuat Pemerintah Kabupaten Jombang berusaha untuk mengembalikan peran aktif penyandang disabilitas mental di lingkungan mereka. Upaya tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Pasal 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pada Pasal 12 Ayat (1) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam menangani pasien disabilitas untuk mengupayakan mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif. Pasal 12 Ayat (2) Pemerintah Daerah mengupayakan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dengan kemudahan aksesibilitas, pelayanan rehabilitasi, pemberian bantuan, dan memfasilitasi dalam usaha pengembangan organisasi untuk kesejahteraan. Pada Pasal 12 Ayat (3) sasaran pelayanan kesejahteraan sosial meliputi, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

Bentuk implementasi secara nyata dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Pasal 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ialah adanya program yang dinamakan *Karepe Dimesemi Bojo*, merupakan singkatan dari Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang. Tujuan adanya program ini sendiri adalah pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan peran masyarakat disabilitas mental di wilayah Kabupaten Jombang dalam aktivitas produktif. Program *Karepe Dimesemi Bojo* ini berada dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan telah menjadi salah satu finalis terbaik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) tahun 2019. Program *Karepe Dimesemi Bojo* memberikan bentuk pemberdayaan kepada penyandang disabilitas mental berupa, terapik fisik dengan melakukan olahraga atau rekreasi singkat, terapi mental serta spiritual dengan menghadiri acara keagamaan, terapi psikososial dengan benyanyi atau bermain alat musik, dan terakhir pelatihan keterampilan.

Pada penelitian program *Karepe Dimesemi Bojo* akan berfokus pada evaluasi program menggunakan teori evaluasi dari William N Dunn (2003). Pada teori ini terdapat enam faktor untuk melakukan evaluasi, efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. melalui penelitian terdahulu dan wawancara awal yang telah peneliti lakukan ditemukan adanya tidak keselarasan dengan teori yang ada. petugas medis kualifikasi kejiwaan masih sangat minim, hal ini berkaitan dengan faktor efisiensi kinerja guna melihat usaha untuk mencapai tujuan. Pusat rehabilitasi hanya berada di Puskesmas Dukuhklopo (Tukiman et al., 2021) dan belum menyeluruh masyarakat mengetahui program *Karepe Dimesemi Bojo*, hal ini berkaitan dengan faktor perataan dimana manfaat dari sebuah program telah terdistribusi dengan menyeluruh atau belum. Adanya pihak keluarga yang masih kurang kooperatif dalam mendampingi penyandang disabilitas mental (Inggil

Pangestu & Wibawani, 2022), hal ini berkaitan dengan faktor responsivitas dimana menekankan pada seberapa tinggi nilai kepuasan dari hasil sebuah kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan atau preferensi kepada kelompok-kelompok tertentu. Fasilitas untuk pelatihan ketrampilan penyandang disabilitas mental masih dirasa kurang memadai (Chisnullah & Meirinawati, 2022), hal ini berkaitan dengan faktor kecukupan dimana menekankan pada seberapa besar dampak pencapaian hasil yang diharapkan dalam memberikan solusi atas sebuah masalah. Kemudian pada hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Jombang terkait evaluasi program *Karepe Dimesemi Bojo*, ditemukan bahwa salah satu kendalanya adalah tidak adanya shelter khusus dari Dinas Sosial Jombang untuk menampung secara mandiri penyandang disabilitas mental sehingga menyebabkan pelayanan rehabilitasi dirasa belum menyeluruh dirasakan masyarakat, hal ini berkaitan dengan faktor efektivitas dimana menekankan pada seberapa jauh capaian program atau kebijakan yang telah berlangsung. Kendala lainnya ialah pemberian manfaat dari program *Karepe Dimesemi Bojo* diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat jombang karena keterbatasan tempat menjadi salah satu penghalang meratanya pemberian manfaat dari program ini, hal ini berkaitan dengan faktor ketepatan dimana menekankan pada seberapa besar nilai kegunaan atau manfaat dari tujuan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah program *Karepe Dimesemi Bojo* bagi penyandang disabilitas mental Dinas Sosial Kabupaten Jombang sudah berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program *Karepe Dimesemi Bojo* di Dinas Sosial Kabupaten Jombang menggunakan teori evaluasi dari William N Dunn. Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan saran kepada pihak-pihak terkait untuk terus berupaya mengoptimalkan program *Karepe Dimesemi Bojo* menjadi lebih baik, sehingga masyarakat penyandang disabilitas mental di Kabupaten Jombang dapat diberdayakan dan mendapatkan manfaat dari bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif dan mendeskripsikan tentang Evaluasi Program *Karepe Dimesemi Bojo* Bagi Penyandang Disabilitas Mental Di Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Penelitian ini bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Adapun informan pada penelitian ini meliputi: informan kunci meliputi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan perawat jiwa Puskesmas Dukuhklopo. Sedangkan informan tambahan yang meliputi keluarga pasien program *Karepe Dimesemi Bojo*. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Milles, Huberman dan Saldana 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi merupakan bagian dari proses analisis sebuah kebijakan. Umumnya evaluasi digunakan untuk menilai apakah sebuah kebijakan telah berjalan sesuai tujuan atau belum, dengan adanya proses evaluasi dari sebuah kebijakan dapat memungkinkan untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan kearah yang lebih baik terhadap sebuah kebijakan.

Program *Karepe Dimesemi Bojo* merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Pasal 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Program *Karepe Dimesemi Bojo* memiliki tujuan untuk meningkatkan peran masyarakat disabilitas mental di seluruh wilayah Kabupaten Jombang dalam aktivitas produktif. Untuk mengetahui apakah program telah berjalan dengan optimal perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui letak kekurangan ataupun kendala pada saat pelaksanaan program *Karepe Dimesemi Bojo* di Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Efektivitas

William N Dunn menyatakan Efektifitas ialah melihat seberapa jauh capaian program atau kebijakan yang telah berlangsung. Dalam kasus efektifitas, William N. Dunn menekankan sangat penting memahami kebutuhan dari program atau kebijakan publik sebelum melakukan evaluasi agar fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian poin penting mengenai efektifitas terletak pada stakeholder yang ikut terlibat dalam sebuah program atau kebijakan, adanya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan atau penerima manfaat dari program atau kebijakan dapat meningkatkan validitas temuan evaluasi. Selain itu, efektifitas evaluasi memberikan informasi mengenai ada tidaknya hambatan pada program sehingga program dapat disesuaikan atau diperbaiki sesuai kondisi terbaru. Seperti yang telah dinyatakan oleh Dunn, peneliti akan melakukan penelitian pada jalannya program *Karepe Dimesemi Bojo* di Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk mengetahui seberapa jauh tingkat efektifitas program tersebut dengan merujuk pada tiga poin penting tersebut.

Adapun sasaran kajian pada efektifitas dinilai dari tercapainya tujuan program *Karepe Dimesemi Bojo* berdasarkan PERDA Kabupaten Jombang Nomor 14 Pasal 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu Pemerintah Daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas tanpa ada diskriminatif. Pada sasaran kajian ini hasil dari wawancara dengan *key informan* bahwa program ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang tertera pada PERDA. Dimana telah dilakukan rehabilitasi, pelatihan keterampilan, pemberian bantuan, hingga kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas dan keluarga untuk mendapatkan pelayanan program ini.

Kemudian peneliti menilai efektifitas dari pihak mana saja yang ikut terlibat dan bagaimana kontribusinya pada program *Karepe Dimesemi Bojo*. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa pada sasaran kajian ini pihak yang turut terlibat dalam program ini ialah, Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang, Puskesmas Dukuhklopo, Perangkat Desa Dukuhklopo, beserta dari posyandu jiwa. Namun, terdapat kendala belum adanya *shelter* mandiri yang dapat digunakan sebagai tempat rehabilitasi penyandang disabilitas mental. Belum adanya *shelter* ini mempengaruhi luas cakupan penerima manfaat program dan pelayanan yang diberikan.

Selain itu, peneliti menilai dari hambatan yang dirasakan dari keluarga pasien disabilitas mental yang mengikuti program *Karepe Dimesemi Bojo*. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan keluarga pasien penyandang disabilitas mental tidak pernah merasakan adanya hambatan. Mereka lebih merasakan adanya manfaat langsung yang dirasakan selama mengikuti program *Karepe Dimesemi Bojo* yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Efisiensi

William N Dunn mengartikan efisiensi sebagai seberapa besar usaha yang diperlukan guna mencapai hasil yang diharapkan, dimana pada faktor ini menekankan pada seberapa jauh capaian program atau kebijakan yang telah berlangsung. Efisiensi pada evaluasi memiliki beberapa poin penting salah satunya merujuk pada cara terbaik untuk menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil evaluasi yang diinginkan. Selain itu, Dunn menekankan bahwa evaluasi yang efektif mencakup hasil akhir beserta proses dari evaluasi sendiri haruslah efektif (menghasilkan hasil yang diinginkan) dan efisien (melakukannya dengan biaya, waktu, dan upaya yang minimal). Untuk itu pada program *Karepe Dimesemi Bojo* di Dinas Sosial Kabupaten Jombang peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa jauh tingkat efektivitas program tersebut.

Pada faktor efisiensi peneliti menilai dari jumlah tenaga kerja. Adapun jumlah tenaga kerja medis dalam merawat pasien disabilitas mental pada program *Karepe Dimesemi Bojo* terdiri dari, 1 dokter jiwa, 1 perawat jiwa, dan 60 kader posyandu jiwa yang terbagi di 6 desa. Dengan jumlah tenaga kerja medis tersebut dikatakan mampu untuk menangani pasien disabilitas mental pada program *Karepe Dimesemi Bojo* yang saat ini berjumlah 183 orang yang terbagi di 6 desa. Dari jumlah tenaga medis dan pasien disabilitas mental pada program *Karepe Dimesemi Bojo* dinyatakan berbanding lurus sehingga sudah tercapainya efisiensi pada sasaran kajian ini.

Adapun penilaian lain terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rehabilitasi. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Anik Rofikoh selaku perawat jiwa di Puskesmas Dukuhklopo, beliau menyatakan untuk rata-rata masa rehabilitasi yang dibutuhkan agar keadaan pasien disabilitas mental stabil dalam kurun waktu 5 bulan hingga 1 tahun. Namun, waktu tersebut bisa lebih lama tergantung dari kondisi pasien diabilitas mental. Untuk kegiatan rehabilitasi secara rutin mengadakan senam bersama, kemudian pemberdayaan keterampilan berupa potong rambut, menganyam, menjahit, hingga diberikan terapi menyanyi dan bermain alat musik.



Gambar 1. Kegiatan pemberdayaan keterampilan potong rambut (11 Juni 2024)

Sumber: Dokumentasi Observasi



Gambar 2. Kegiatan rehabilitasi dengan bermain music dan menyanyi (11 Juni 2024)

Sumber: Dokumentasi Observasi



Gambar 3. Kegiatan rehabilitasi dengan melakukan senam sehat bersama (11 Juni 2024)

Sumber: Dokumentasi Observasi

Selain melihat dari aspek jumlah tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk rehabilitasi, diperlukan penilaian dari keluarga pasien disabilitas mental yang mengikuti program *Karepe Dimesemi Bojo* akan usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dikatakan Dinas Sosial telah melakukan berbagai usaha untuk melancarkan program *Karepe Dimesemi Bojo* sejak tahun 2019 hingga sekarang. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan keluarga pasien bahwa mereka mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai cara menangani keluarga mereka yang sakit, kemudian diberikan bantuan berupa barang maupun uang, selain itu juga pasien dibekali pelatihan keterampilan untuk membantu perekonomian keluarga mereka.

Kecukupan

Pada teori evaluasi William N Dunn menjadikan kecukupan menjadi salah satu penilaian untuk melihat apakah sebuah kebijakan telah memberikan dampak yang cukup dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kecukupan pada evaluasi memiliki beberapa poin yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan sebuah kebijakan atau program. Ini termasuk input (sumber daya yang digunakan), proses (cara program dijalankan), output (hasil langsung yang dihasilkan program), dan outcome (dampak jangka panjang program). Dunn menekankan bahwa analisis kecukupan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan situasi atau lingkungan tertentu. Karena perbedaan dalam kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, untuk menilai apakah program tersebut cukup memenuhi kebutuhan dan tujuan saat ini, evaluasi harus mempertimbangkan konteks yang relevan. Selain itu, kecukupan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dimana harus dipastikan bahwa program mencapai tujuan dan memberikan dampak positif. Adapun pada program *Karepe Dimesemi Bojo* yang peneliti teliti, untuk menilai apakah program tersebut sudah cukup dalam memberikan dampak positif yang dibutuhkan peneliti membuat 3 sasaran kajian yang disesuaikan dengan poin penting mengenai faktor kecukupan.

Penilaian pertama peneliti fokuskan pada fasilitas perawatan bagi penyandang disabilitas mental pada program *Karepe Dimesemi Bojo*. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas perawatan sudah cukup. Dimana pihak Dinas Sosial Kabupaten Jombang telah mengupayakan penyediaan fasilitas yang diperlukan. Fasilitas yang diberikan pihak Dinas Sosial Kabupaten Jombang guna menunjang proses rehabilitasi berupa alat-alat pelatih keterampilan. Alat tersebut berupa pencukur rambut, alat menganyam, rebana, ada juga alat-alat bengkel.

Adapun penilaian mengenai kesejahteraan. Dalam sasaran kajian ini Dinas Sosial Kabupaten Jombang beserta Puskesmas Dukuhklopo mengklaim telah berhasil mengatasi permasalahan kesejahteraan yang dialami penyandang disabilitas mental. Dimana Dinas Sosial telah melakukan tahapan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas mental berupa pelatihan keterampilan guna memberikan mereka bekal untuk membantu perekonomian keluarga dan ada juga bantuan uang dan bekal usaha bagi keluarga pasien.

Selain berfokus pada pandangan dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang peneliti melakukan konfirmasi kepada keluarga pasien disabilitas mental yang mengikuti program *Karepe Dimesemi Bojo*. Fokus peneliti menilai apakah bantuan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Jombang sudah cukup memberikan dampak positif dalam permasalahan kesejahteraan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, keluarga pasien merasa cukup dalam mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. bantuan yang didapatkan berupa paket usaha, peralatan bengkel, adapun beras dan uang yang diberikan rutin setahun sekali. Selain bantuan tersebut, keluarga pasien tidak dikenakan biaya apapun tentang rehabilitasi dan obat yang diperlukan keluarga mereka. Tetapi bantuan berupa paket usaha yaitu ayam petelor belum optimal dikarenakan banyak yang mengalami kegagalan.

Perataan

Perataan dalam teori evaluasi milik William N Dunn diartikan sebagai seberapa luas pendistribusian manfaat sebuah kebijakan yang dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat. Perataan dalam evaluasi berperan dalam mengidentifikasi kinerja sebuah kebijakan atau program secara berkala, hal ini berguna untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan yang konsisten pada kebijakan atau program. Pada penelitian evaluasi program *Karepe Dimesemi Bojo* faktor perataan berguna untuk menilai apakah manfaat sudah dirasakan oleh masyarakat secara merata.

Adapun sasaran kajian pertama penilaian mengenai adanya sosialisasi program *Karepe Dimesemi Bojo* oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang kepada masyarakat. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa telah dilaksanakan sosialisasi kepada keluarga pasien disabilitas mental maupun kepada masyarakat umum mengenai program ini, sehingga peneliti bisa simpulkan bahwa pada pada sasaran kajian pertama telah terlaksana.

Untuk sasaran kajian kedua peneliti menilai dari pusat rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan terkait didapatkan hasil bahwa ada rencana untuk mewujudkan *shelter* mandiri. Hal ini dikarenakan saat ini tempat untuk melakukan rehabilitasi masih berada di Balai Desa Dukuhklopo, sehingga Dinas Sosial maupun Puskesmas Dukuhklopo berharap untuk memiliki *shelter* mandiri guna memperluas pendistribusian manfaat kepada masyarakat lain.

Dan terakhir peneliti melakukan penilaian terhadap pelaksanaan sosialisasi kepada keluarga pasien penyandang disabilitas mental yang mengikuti program *Karepe Dimesemi Bojo*. Berdasarkan hasil wawancara bahwa telah dilakukan sosialisasi mengenai program tersebut, ditambah dengan dilakukannya pelatihan kepada keluarga pasien untuk menangani pasien disabilitas mental dengan baik.

Responsivitas

William N Dunn sendiri menyatakan responsivitas merupakan ukuran seberapa tinggi nilai kepuasan dari hasil sebuah kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan atau preferensi kepada kelompok-kelompok tertentu. Pada program

Karepe Dimesemi Bojo respon dari keluarga pasien merupakan hal yang penting untuk melihat apakah mereka merasa puas dengan program tersebut atau ada ketidakpuasaan sehingga perlu adanya perbaikan. Oleh karena itu untuk melihat faktor responsivitas ini peneliti membuat dua sasaran kajian untuk mengevaluasi apakah program ini sudah baik.

Adapun sasaran kajian pertama mengenai respon dan partisipasi pihak keluarga pasien yang mengikuti program *Karepe Dimesemi Bojo*. Setelah melakukan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pihak keluarga merasan sangat antusias dengan adanya program ini. Hal ini dikarenakan pihak keluarga merasa terbantu dengan adanya program dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Kemudian sasaran kajian kedua untuk menilai hasil dari program *Karepe Dimesemi Bojo* tentang keluhan yang dirasakan keluarga pasien terhadap program *Karepe Dimesemi Bojo*. Didapatkan jawaban dari hasil wawancara bahwa tidak ada keluhan apapun, melainkan merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa biaya selama rehabilitasi ataupun obat yang didapatkan pasien gratis, lalu terdapat bantuan dari pihak Dinas Sosial kabupaten Jombang, sehingga merasa tidak ada keluhan apapun.

Ketepatan

Dalam teori evaluasi William N Dunn, ketepatan dinyatakan pada seberapa besar nilai kegunaan atau manfaat dari tujuan kebijakan. Pada program *Karepe Dimesemi Bojo*, ketepatan ditujukan untuk melihat apakah program telah memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Untuk mengetahui faktor ketepatan pada program *Karepe Dimesemi Bojo* peneliti membuat 3 sasaran kajian untuk memudahkan dalam penilaian.

Adapun sasaran kajian pertama mengenai apakah program *Karepe Dimesemi Bojo* apakah memberikan manfaat. Melihat dari hasil penelitian didapatkan bahwa, program tersebut telah memberikan manfaat kepada pasien dan keluarga pasien disabilitas mental seperti yang diharapkan.

Kemudian pada sasaran kajian kedua mengenai informasi mengenai program *Karepe Dimesemi Bojo* apakah telah tersampaikan kepada kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran. Melihat dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan keluarga pasien disabilitas mental, didapatkan bahwa informasi mengenai program ini telah tersampaikan dengan jelas berkat adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial bersama Puskesmas Dukuhklopo.

Dan yang terakhir sasaran kajian ketiga mengenai manfaat yang dirasakan karena program *Karepe Dimesemi Bojo*. Melalui hasil wawancara diketahui bahwa keluarga pasien merasakan manfaat akan adanya program tersebut. Mereka merasa terbantu dengan adanya program tersebut, terlebih program tersebut tempat rehabilitasinya dekat dan juga tidak ada biaya apapun.

Setiap tabel dan gambar diberi judul dan sumber. Judul Tabel ditaruh di atas tabel. Judul gambar di taruh di bawah gambar. Penomoran judul tabel dan judul gambar berurutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan adapun kesimpulan yaitu program *Karepe Dimesemi Bojo* belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan dari enam faktor evaluasi masih ditemukan tiga faktor yang belum berjalan optimal, faktor tersebut adalah efektivitas, kecukupan, dan perataan. Sedangkan untuk faktor efisiensi, responsivitas, dan ketepatan sudah berjalan optimal.

Faktor efektivitas pelaksanaan program *Karepe Dimesemi Bojo* bagi penyandang disabilitas mental di Dinas Sosial Kabupaten Jombang belum berjalan optimal. Meski tujuan awal dari program *Karepe Dimesemi Bojo* yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 14 Pasal 12 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah tercapai, namun terdapat kendala berupa tidak adanya *shelter* mandiri bagi penyandang disabilitas mental sehingga membuat capaian program belum begitu luas.

Faktor efisiensi pelaksanaan program *Karepe Dimesemi Bojo* bagi penyandang disabilitas mental di Dinas Sosial Kabupaten Jombang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan tenaga medis kejiwaan untuk merawat pasien disabilitas mental telah memenuhi, kemudian waktu yang digunakan untuk melakukan rehabilitasi dirasa sudah cukup, dan usaha dari Dinas Sosial bersama Puskesmas Dukuhklopo untuk mencapai tujuan program ini sudah baik.

Faktor kecukupan pelaksanaan program *Karepe Dimesemi Bojo* bagi penyandang disabilitas mental di Dinas Sosial Kabupaten Jombang belum cukup memenuhi faktor kecukupan. Meskipun program ini telah berupaya dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan penyandang disabilitas mental dan memberikan bantuan kepada pihak keluarga pasien disabilitas mental, namun perlu adanya evaluasi mengenai bantuan paket usaha berupa ayam petelor karena masih ditemukan kegagalan.

Faktor perataan pelaksanaan program *Karepe Dimesemi Bojo* bagi penyandang disabilitas mental di Dinas Sosial Kabupaten Jombang belum cukup merata. Meskipun hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Jombang telah mengetahui program *Karepe Dimesemi Bojo* dengan adanya sosialisasi, tetapi tidak semuanya dapat menjangkau program tersebut dikarenakan keterbatasan tempat rehabilitasi yang dimiliki sekarang.

Faktor responsivitas pelaksanaan program *Karepe Dimesemi Bojo* bagi penyandang disabilitas mental di Dinas Sosial Kabupaten Jombang sudah berhasil. Hal ini dibuktikan dengan respon positif dan mendukung dari berbagai pihak dengan adanya program *Karepe Dimesemi Bojo*.

Faktor ketepatan pelaksanaan program *Karepe Dimesemi Bojo* bagi penyandang disabilitas mental di Dinas Sosial Kabupaten Jombang sudah berjalan dengan tepat. Dimana program *Karepe Dimesemi Bojo* telah memberikan manfaat selaras dengan tujuannya yang tercantum di Peraturan Daerah Nomor 14 Pasal 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dengan mengacu pada hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang disampaikan sebelumnya, maka peneliti berupaya memberikan saran sebagai

berikut, Dinas Sosial Kabupaten Jombang diharapkan bisa segera mewujudkan adanya *shelter* mandiri bagi penyandang disabilitas mental, agar lebih banyak penyandang disabilitas mental di kabupaten jombang yang dapat merasakan manfaat program tersebut. dan perlu adanya evaluasi mengenai bantuan paket usaha ayam petelur dikarenakan bantuan tersebut masih ditemukan kegagalan sehingga kurang memberikan dampak terhadap kesejahteraan keluarga pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Allo, E. A. T. (2022). Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 807–812. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812>
- Chisnullah, M. R., & Meirinawati, M. (2022). Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojo (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Studi Pada Desa Bongkot). *Publika*, 937–952. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p937-952>
- Cindy Khoirun Nisak, F. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Stikip PGRI Jombang*, 2, 409-415 [http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/579%0Ahttp://urj.uin\(Cindy Khoirun Nisak, 2023\)](http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/579%0Ahttp://urj.uin(Cindy%20Khoirun%20Nisak,%202023))
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Intergrated Approach* (6th ed.).
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif (H. Sazali, Ed.; 1st ed.). Wal ashri Publishing.
- Inggil Pangestu, ah, & Wibawani, S. (2022). Strategi Pemberdayaan Program Karepe Dimesemi Bojo Pada Penyandang Disabilitas Mental Karepe Dimesemi Bojo. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3). <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Irwanto, Kasim, E. R., Lusli, M., & Siradj, O. (2010). Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review.
- Ismariana, I., & Prabawati, I. (2020). Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Miskin Di Kelurahan Tembok Duku Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. www.kemensos.go.id
- Kristiandy, F. (2021). Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas: Situasi, Kondisi, Permasalahan Dan Solusi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Sekitar Dan Lembaga Permasayarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1). <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, (2016).

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kartu Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. 2 (2021).
- Metra Naibaho, O., Krisnani, H., & Nuriyah, E. (2015). 52 Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang. *2*(2), 301–444.
- Nanda, A. R., & Herawati, R. (2021). Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(3), 325–336.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (M. Albina, Ed.; 1st ed.). Harfa Creative.
- Pasciana, R. (2020). Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kabupaten Garut). *SAWALA*, *8*(2), 192–204.
- Ratnawati, S., Julianti, I. S., & Ismail. (2023). Evaluasi Program Peduli Dilan (Disabilitas Dan Lanjut Usia). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *7*.
- S, C. T., Oetopo, A., & Hazmi, F. al. (2022). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Mental Melalui Pelatihan Membatik di Yayasan Jiwa Layang. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, *6*(2), 127–137. <https://doi.org/10.21831/diklus.v6i2.47968>
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, *1*(2), 166. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan (1st ed.). Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Tukiman, Lestari, T. P., Rahayu, E. P., & Laili, R. A. N. (2021). Pemberdayaan Disabilitas Mental Melalui Program Karepe Dimesemi Bojo Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Syntax Transformation*, *2*(5). <https://doi.org/10.46799/jurnalsyntaxtransformation.v2i5.269>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pub. L. No. 11 (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Pub. L. No. 19 (2011).
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *20*, 127–142.
- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 10 (2024) 4859 – 4871 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i10.3351

Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1),
197.<https://doi.org/10.31078/jk1719>